

ANALISIS KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DI DESA BUNTU KARAU KECAMATAN JUAI KABUPATEN BALANGAN

Lismawati¹, Dr.Murdiansyah Herman, S.Sos., M.Ap², Fika Fibriyanita, S.Sos., M.AP.
1Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Uniska Banjarmasin

Lismawati@gmail.com

ABSTRAK

LISMAWATI. NPM. 17120330, Analisis Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Buntu Karau Kecamatan Juai Kabupaten Balangan, dibawah bimbingan Dr. Murdiansyah Herman, S.Sos., M.AP dan Fika Fibriyanita, S.Sos., M.AP

Penelitian ini bertujuan : (1) Untuk mengetahui bagaimana kinerja masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa. (2) Untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi BPD dalam pembangunan desa melalui penggunaan dana Desa.

Pelaksanaan penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode penelitian yang digunakan menggunakan tipe penelitian deskriptif analisis. Populasi penelitian adalah seluruh masyarakat sebanyak 50 orang. Sampel digunakan cara proporsional yaitu sebanyak 2 orang aparat Desa, RT sebanyak 1 orang dan Masyarakat sebanyak 3 orang. Teknik pengumpulan data penelitian menggunakan wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Partisipasi BPD Buntu Karau dalam perencanaan pembangunan desa terlihat dari perbedaan kinerja masyarakat yang mengikuti musyawarah dan masyarakat yang tidak mengikuti musyawarah memiliki perbedaan. Masyarakat yang mengikuti musyawarah cenderung memiliki kinerja yang positif dalam pengelolaan dana desa. Hal tersebut dikarenakan masyarakat mendapatkan dukungan dari tokoh masyarakat untuk aktif mengelola dana desa. Masyarakat yang tidak mengikuti musyawarah cenderung memiliki kinerja yang negatif dalam pengelolaan dana desa. hal tersebut dikarenakan mereka tidak mendapatkan dukungan dari tokoh masyarakat baik itu dukungan penghargaan, dukungan informatif, dan dukungan instrumental. (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi BPD dalam pembangunan desa melalui penggunaan dana desa terlihat dari tingkat pendidikan, usia, dan pekerjaan. Masyarakat mengikuti musyawarah memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan mayoritas bekerja sebagai RT, RW, serta pegawai. Masyarakat yang mengikuti musyawarah desa turut membuat kinerja masyarakat positif dalam pengelolaan dana desa. Mereka memiliki pengetahuan serta kesadaran untuk terlibat dalam mengelola dana desa. Usia yang produktif pun membuat masyarakat lebih aktif dan bekerja lebih baik dalam mengelola dana desa. Tingkat pendidikan yang rendah juga mempengaruhi kinerja masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Masyarakat tidak memiliki pengetahuan yang banyak mengenai dana desa sehingga kesadaran mereka untuk ikut terlibat dalam pengelolaan dana desa pun sangat rendah.

Kata Kunci : BPD, Dana Desa, Pembangunan Desa

ABSTRACT

LISMAWATI. NPM. 17120330, *Performance Analysis of the Village Consultative Body (Bpd) in Village Development Planning in Buntu Karau Village, Juai District, Balangan Regency, under the guidance of Dr. Murdiansyah Herman, S.Sos., M.AP and Fika Fibriyanita, S.Sos., M.AP*

This study aims: (1) To find out how the community's performance in village development planning. (2) To identify what factors influence BPD in village development through the use of Village funds.

The implementation of this research will use a qualitative approach. The research method used is descriptive analytical research type. The research population is the entire community as many as 50 people. The sample used a side-by-side proportional method, namely 2 village officials, 1 RT and 3 people from the community. Research data collection techniques using interviews and documentation.

The results of the study show that: (1) BPD Buntu Karau's participation in village development planning can be seen from the differences in the performance of people who take part in deliberation and people who do not participate in deliberation have differences. Communities who take part in deliberation tend to have a positive performance in managing village funds. This is because the community gets support from community leaders to actively manage village funds. Communities who do not participate in deliberation tend to have a negative performance in managing village funds. This is because they do not get support from community leaders, both award support, informative support, and instrumental support. (2) The factors that influence the BPD in village development through the use of village funds can be seen from the level of education, age, and occupation. The people participating in the deliberation have a higher level of education and the majority work as RT, RW, and employees. Communities who take part in village deliberations contribute to positive community performance in managing village funds. They have the knowledge and awareness to be involved in managing village funds. A productive age also makes the community more active and work better in managing village funds. The low level of education also affects the community's performance in managing village funds. The community does not have much knowledge about village funds so that their awareness to get involved in managing village funds is very low.

Keywords: BPD, Village Fund, Village Development

PENDAHULUAN

Penggunaan dana desa menurut Permendes No. 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Dana Desa tahun 2015 diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini karena melalui pembangunan kualitas hidup dan kehidupan BPD dapat meningkat, sedangkan melalui pemberdayaan masyarakat, kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dapat berkembang. Oleh karena itu, sudah sepatutnya dana desa diprioritaskan untuk pelaksanaan program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat mengingat betapa pentingnya kedua hal tersebut untuk menunjang terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Sejak diterapkannya kebijakan dana desa, masih terdapat beberapa permasalahan dalam pengelolaannya. Kendala yang menghambat kegiatan pengelolaan dana desa adalah kurangnya sosialisasi pemerintah, belum bakunya aturan pelaksanaan, dan keterlambatan pencairan dana. BPD dalam mengelola dana desa masih kurang. Tidak semua desa di Kecamatan Sampahan melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, seperti mengutamakan kelompok tertentu sehingga berdampak pada minimnya pengetahuan mengenai dana desa.

Desa Buntu Karau merupakan salah satu desa di Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan. Wilayahnya terdiri dari satu Rukun Warga (RW), dan enam Rukun Tetangga (RT). Desa Buntu Karau telah menerima dana desa yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur desa berupa pembuatan saluran drainase, jalan beton, sarana olahraga, dan sebagainya. Pengelolaan dana desa di Buntu Karau dilakukan dengan melibatkan masyarakat. Untuk melibatkan seluruh masyarakat dalam pengelolaannya, diperlukan respon positif dari masyarakat.

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan pada bagian terdahulu, maka dapat dirumuskan sebagai berikut : 1) Bagaimanakah kinerja BPD Buntu Karau dalam Perencanaan Pembangunan Desa? Dan 2) Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja BPD dalam pembangunan desa melalui penggunaan dana desa?

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian Deskriptif Kualitatif, dengan narasumber adalah anggota BPD Desa Buntu Karau Kecamatan Juai Kabupaten Balangan dengan menggunakan lembar pertanyaan yang kemudian hasilnya dicatat dan dikategorikan untuk dikroscek dalam proses mendapatkan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

a. Kinerja anggota BPD dalam pembangunan di Desa Buntu Karau

1) Tahap pengambilan keputusan dalam perencanaan

Tahap pengambilan keputusan dalam perencanaan pembangunan desa melalui penggunaan dana desa diawali dari sosialisasi pembangunan desa, menghadiri kegiatan perencanaan pembangunan dan dilanjutkan dengan perencanaan pembangunan desa. Perencanaan pembangunan desa diharapkan dapat menghasilkan output perencanaan pembangunan desa yang baik dan sesuai dengan kebutuhan desa dan masyarakatnya. Pengambilan keputusan

untuk perencanaan pembangunan haruslah didapat dari prioritas yang paling besar yang dibutuhkan oleh masyarakat. Skala prioritas ini berasal dari berbagai usulan yang disampaikan masyarakat, sehingga didapat perencanaan pembangunan yang menurut partisipasi paling mendesak untuk disegerakan. Agar didapat prioritas rencana pembangunan ini tidak semata-merta berasal dari para usulan dari para stakeholder, tetapi juga harus berasal dari usulan seluruh kalangan masyarakat, dan dilanjutkan dengan rembung yang menghasilkan keputusan perencanaan yang paling diprioritaskan.



Gambar 4.1 Logo BPD

2) Tahap Implementasi

Tingkat partisipasi pada tahap implementasi merupakan tingkatan partisipasi dan keaktifan responden dalam melaksanakan setiap kegiatan pembangunan yang telah direncanakan yakni dari pelaksanaan pertemuan, pembentukan kelompok pelaksana, hingga porses eksekusi pembangunan yang telah direncanakan. Tahap implementasi pembangunan desa melalui penggunaan dana desa diawali dengan sosialisasi pertemuan mengenai pembangunan desa, kemudian anggota BPD menghadiri kegiatan perencanaan pembangunan dan dilanjutkan dengan penentuan kelompok sebagai eksekusi dalam pelaksanaan pembangunan.

3) Tahap Pelaksanaan



Gambar 4.2 Pembuatan Saluran WC sehat ke rumah Warga

Tahap pelaksanaan yang melibatkan masyarakat ini bertujuan agar pembangunan desa tetap menggunakan swadaya masyarakat agar masyarakat tahu dan mengerti untuk apa penggunaan dana desa, serta diharapkan dapat menghasilkan output pembangunan desa

yang baik dan sesuai dengan kebutuhan desa dan masyarakatnya. Selain itu pelibatan masyarakat pada tahap ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran serta mendorong masyarakat untuk lebih memberikan perhatian kepada kegiatan pembangunan yang ada di desa.

2. Faktor Pendukung anggota BPD dalam melakukan pembangunan di desa Buntu Karau

Faktor pendukung yang memungkinkan anggota BPD pada tahap implementasi dapat berjalan dengan baik adalah adanya dukungan dari tokoh dan tetua masyarakat yang memahami dan mengetahui bahwa hasil pembangunan merupakan proses memanfaatkan sumber daya yang terbatas tetapi nantinya hasil yang diperoleh dari kegiatan pembangunan desa yaitu berupa pemanfaatan hasil pembangunan baik infrastruktur maupun pemberdayaan yang berguna untuk masyarakat. Manfaat dari hasil pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat adalah berupa manfaat dari pembangunan infrastruktur yaitu berupa jalan-jalan di lingkungan desa, adanya parit-parit yang berguna untuk mencegah pengikisan tanah di lingkungan masyarakat apabila musim hujan dan pasang terjadi.

Selain itu juga bangunan-bangunan penunjang pendidikan, kesehatan dan gedung serba guna, serta fasilitas olahraga di lingkungan masyarakat. Manfaat dari kegiatan pembangunan desa yang masyarakat rasakan belum sampai pada tahap pemberdayaan masyarakat, hal ini dikarenakan adanya skala prioritas yang ditetapkan pada kegiatan pertemuan-pertemuan yang diadakan adalah untuk pembangunan infrastruktur saja.



Gambar 4.3 Pembuatan siring anti longsor di rumah warga

2. Pembahasan

1. Partisipasi Anggota BPD dalam pembangunan di Desa Buntu Karau

Partisipasi anggota BPD pada suatu program pembangunan terdiri atas sebagai berikut :

1. Tahap pengambilan keputusan dalam perencanaan

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota BPD Desa Buntu Karau dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 8 Agustus 2021 dikemukakan sebagai berikut. “...sampai hari ni kalau urusan perencanaan pembangunan itu ya perangkat desa dan anggota BPD yang mengarahkan...” Anggota BPD selalu diikutsertakan dalam kegiatan perencanaan pembangunan, sehingga muncul pandangan adanya unsur kedekatan dengan pemerintah atau perangkat desa untuk ikut serta dalam kegiatan perencanaan. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan perangkat Desa yang dilakukan pada tanggal 8 Agustus 2021 dikemukakan sebagai berikut

“...kami sudah instruksikan kepadasemua anggota BPD, cuma terkadang tidak semuanya dapat hadir karena ada keperluan mendesak, namun biasanya semua anggota memprioritaskan untuk hadir dan memberi kabar bila berhalangan”

2. Tahap implementasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota BPD aparat Desa dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 8 Agustus 2021 dikemukakan sebagai berikut. *“.... Kita wajib mengajak semua masyarakat, minimal ada perwakilan masyarakatnya. Agar masyarakat tahu bagaimana perkembangan pembangunan di desa ini...”*



Gambar 4.4 Kegiatan sanggar Seni Remaja Desa Buntu Karau

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat Desa dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 8 Agustus 2021 dikemukakan sebagai berikut. *“...pembangunan disini cukup jelas informasinya, sehingga warga juga senang untuk ikut serta...”* sehingga dapat disimpulkan mayoritas responden merasa berpartisipasi secara penuh maupun hanya ikut meramaikan tetapi bukan sebagai formalitas belaka namun biar mempercepat pada tahap implementasi dari rencana pembangunan melalui penggunaan dana desa. Sehingga masyarakat maupun anggota BPD bisa menyorakan aspirasinya agar pihak pemerintahan desatidak terlalu mendominasi dalam mengambil keputusan atau menjalankan kegiatan pembangunan.

3. Tahap implementasi hasil pembangunan

Pada tahap ini responden dapat menikmati hasil pembangunan yang ada di Desa Buntu Karau berupa pembangunan infrastruktur yaitu jalan yang ada di sekitar lingkungan masyarakat, pemanfaatan hasil pembangunan parit, dan fasilitas bangunan lainnya berupa gedung serba guna, posyandu, sarana olahraga, gedung seni dan sekolah untuk anak usia dini. Sehingga informasi mengenai pembangunan kedepannya dapat memberikan saran mengenai hasil pembangunan, hal ini dikarenakan proses pembangunan yang terbuka untuk seluruh anggota BPD maupun perwakilan rakyat.

4. Tahap evaluasi dari hasil pembangunan

Tingkat partisipasi pada tahap evaluasi dari hasil pembangunan merupakan tingkatan BPD dalam menilai keberhasilan dari hasil pembangunan melalui penggunaan dana desa di Desa Buntu Karau. Penilaian hasil pembangunan ini bertujuan untuk melihat seberapa jauh tujuan yang diinginkan BPD Buntu Karau dapat tercapai, dalam hal ini yaitu pembangunan kampung.

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota BPD Desa yang dilakukan pada tanggal 8 Agustus 2021 dikemukakan sebagai berikut. *“...untuk penilaian itu adalah urusan PEMDA sepengetahuan kami ini, sudah ada langsung yang ngeceknnya, seperti kemarin ada orang yang ntah (kurang jelas) dari mana ngecek lagi hasil bangun, dilihat dari dari bajunya orang PEMDA....”*

Masyarakat dapat mengikuti proses penilaian dari hasil pembangunan yang ada di Kampung Buntu Karau dan memberikan saran mengenai pembangunan yang ada dan kedepannya akan tetapi tidak menerima atau tidak didengarkan oleh pemerintah desa. Hal ini dikarenakan pemerintah lebih memikirkan pertanggung jawaban kepada badan

pengawas dari pemerintah daerah serta pertanggung jawaban kepada masyarakat. selain itu pemerintah juga beranggapan bahwa pembangunan telah dianggap berhasil karena tidak adanya kritikan dari masyarakat desa.



Gambar 4.5 Kantor Kepala Desa sebagai tempat Musyawarah BPD

Selain keterlibatan masyarakat dalam beberapa tahapan, ukuran kinerja BPD juga dapat dilihat melalui bentuk partisipasi, dimana masyarakat dapat berpartisipasi baik berbentuk nyata maupun tidak. Selain itu kinerja BPD dalam suatu kegiatan, misalnya dapat berupa hadir dalam penyuluhan saja atau hadir dan memberikan masukan saat penyuluhan juga dapat digunakan untuk mengukur kinerja BPD. Ukuran kinerja BPD ini digunakan sebagai acuan dalam keberhasilan program pembangunan, dimana program dapat dinyatakan berhasil memberdayakan masyarakat jika ukuran kinerja BPD terpenuhi dengan tingkat partisipasi yang konsisten atau bahkan meningkat.

2. Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan BPD dalam pembangunan desa melalui penggunaan dana desa

Secara sederhana kinerja masyarakat dapat dimaknai sebagai upaya masyarakat memberikan umpan balik dalam suatu keadaan, dalam hal ini keadaan yang dimaksud adalah mengenai pengelolaan dana desa. Umpan balik yang diberikan oleh masyarakat dalam pengelolaan dana desa tersebut bisa bersifat positif maupun negatif. Kinerja BPD tidak semata-mata timbul begitu saja namun ada faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan kinerja tersebut. Karakteristik lingkungan sosial dan karakteristik personal merupakan dua faktor yang dapat mempengaruhi kinerja masyarakat. Karakteristik lingkungan sosial sendiri merupakan faktor pembentuk kinerja yang berasal dari luar diri masyarakat itu sendiri seperti lingkungan dan hubungan sosialnya. Faktor tersebut dapat dijabarkan melalui peubah teramati dukungan tokoh masyarakat dan peran kelompok. Karakteristik personal merupakan faktor pembentuk kinerja yang berasal dari masyarakat itu sendiri yang merupakan ciri khas yang melekat dan dapat menjadi pembeda yang khas antara satu individu dengan individu lainnya. Karakteristik personal dapat diamati melalui peubah teramati seperti usia, tingkat pendidikan, dan mata pencaharian.

Dukungan tokoh masyarakat adalah dukungan yang diperoleh dari hubungan interpersonal yang mengacu pada kesenangan, ketenangan, bantuan manfaat, yang berupa informasi verbal yang diterima seseorang atau masyarakat dari tokoh masyarakat yang membawa efek perilaku. Di Desa Buntu Karau sendiri yang dianggap sebagai tokoh masyarakat adalah para alim ulama dan orang yang dituakan. Dukungan tokoh masyarakat sendiri dibedakan menjadi menjadi tiga dukungan, yaitu :

1. Dukungan penghargaan merupakan dukungan yang diberikan oleh tokoh masyarakat yang mencakup ungkapan hormat dan dorongan untuk maju.
2. Dukungan instrumental sendiri merupakan sebuah dukungan yang diberikan oleh tokoh masyarakat yang mencakup pemberian bantuan langsung yang dibutuhkan oleh masyarakat.

3. Dukungan informatif merupakan dukungan yang diberikan oleh tokoh masyarakat yang mencakup pemberian nasehat, petunjuk, saran, dan umpan balik kepada masyarakat.

Dari ketiga jenis dukungan yang diberikan oleh tokoh masyarakat kepada masyarakat yang mengikuti musyawarah, ternyata dukungan yang paling banyak diberikan oleh tokoh masyarakat adalah dukungan penghargaan berupa penyampaian permasalahan masyarakat kepada pengelola dana desa dengan sopan pada saat musyawarah desa agar nantinya pengelolaan dana desa dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Selain itu, tokoh masyarakat juga memberikan dukungan kepada pemerintah desa agar pengelolaan dana desa ini dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota BPD Desa yang mengikuti musyawarah Desa dilakukan pada tanggal 10 Agustus 2021 dikemukakan sebagai berikut.

“.....Tokoh masyarakat cukup aktif kalau mengikuti musyawarah desa, mereka ngasih usulan-usulan seperti pembangunan apa yang sebaiknya dilakukan, khususnya pembangunan yang berkaitan dengan perlengkapan kegiatan ibadah maupun pembinaan generasi muda di desa mereka sendiri. Karena sesepuh dan juga dihormati, ya mereka juga sering dimintai persetujuannya tentang hasil rapat.....”

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota BPD Desa yang pernah mengikuti musyawarah Desa dilakukan pada tanggal 10 Agustus 2021 dikemukakan sebagai berikut. *“.....tokoh masyarakat sering ikut rapat, seperti aktif kalau ada pengajian atau tahlilan”*

Keaktifan tokoh masyarakat membuat masyarakat juga turut dalam kegiatan desa seperti musyawarah untuk mengelola dana desa. Anggapan mereka juga didukung dengan keadaan di lapangan yang menunjukkan bahwa tokoh masyarakat selalu pernah memberikan dukungan apapun baik itu dukungan instrumental, penghargaan dan informatif. Keterlibatan tokoh masyarakat untuk mengajak masyarakat aktif dalam mengelola dana desa dan juga menyampaikan informasi terkait pengelolaan dana desa membuat BPD dan perwakilan masyarakat memiliki kinerja yang baik dalam pengelolaan dana desa. Kinerja tersebut ditunjukkan dengan cukup baiknya kepedulian pada kepentingan masyarakat banyak dalam jalannya pengelolaan dana desa di desa. karena jika tokoh masyarakat aktif memberikan dukungan kepada BPD dan perangkat desa, hal tersebut akan mempengaruhi kinerja BPD dan perwakilan masyarakat menjadi lebih peduli dalam pengelolaan dana desa karena dukungan tersebut berasal dari tokoh masyarakat yang disegani dan pendapatnya akan didengar oleh masyarakat.

Tingkat intensitas interaksi diartikan tingkatan proses komunikasi yang pemimpin lakukan kepada responden di Desa Buntu Karau dalam kurun waktu tertentu. Tingkat intensitas interaksi ini diantaranya dilihat dari tingkat keseringan pemerintah dalam menemui, berinteraksi, bertanya mengenai pembangunan dan mengikuti kegiatan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota BPD Desa Buntu Karau dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 12 Agustus 2021 dikemukakan sebagai berikut. *“....Anggota BPD selalu aktif datang menyampaikan informasi dari hasil musyawarah..”* Mayoritas responden dengan tingkat ekonomi menengah kebawah merasakan tingkat intensitas interaksi yang dilakukan pemerintah desa terbilang berada pada tingkat cukup. Sedangkan mayoritas responden yang tergolong pada masyarakat mampu merasa tingkat intensitas interaksi yang dilakukan pemerintah desa terbilang berada pada tingkat sedang hingga tinggi. Hal ini dikarenakan sebagian besar responden yang tergolong mampu merupakan kerabat dari orang yang berada pada pemerintahan desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota BPD Desa Buntu Karau dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 12 Agustus 2021 dikemukakan sebagai berikut. *“....bila dilihat-lihat sebenarnya kita tidak bisa berbohong, banyak orang yang berkerja disini adalah kerabat dan saudara orang kantor desa ini juga namun memang mereka orang yang berpendidikan dan cukup baik tingkat ekonominya....”* Tingkat transparansi dalam penelitian ini berartikan seberapa transparannya pemerintah desa kepada responden dalam penggunaan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan terdapat tanggung jawab dalam proses pelaksanaan dan penganggarannya. Mayoritas responden merasa bahwa pemerintah cukup terbuka dalam masalah keuangan desa dan pembangunan desa. adanya publikasi yang jelas langsung kepada masyarakat terkait penggunaan keuangan desa ataupun publikasi kegiatan pembangunan desa juga cukup baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota BPD Desa Buntu Karau dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 12 Agustus 2021 dikemukakan sebagai berikut. *“.....kami mengetahui dengan baik mengenai besar anggaran maupun tujuan penggunaannya sehingga kecurangan maupun pemakaian dana desa untuk kepentingan pribadi dapat dihindari ..”*

Hasil wawancara dengan anggota BPD Desa Buntu Karau yang mengikuti musyawarah yang dilakukan pada tanggal 16 Agustus 2021 dikemukakan sebagai berikut. *“...pembangunan di sini sudah cukup baik, kami sebagai anggota BPD selalu aktif memonitor maupun menyuarakan kesepakatan kepada masyarakat..”*

Dari penuturan di atas jelas bahwa masyarakat maupun anggota BPD telah mengetahui bagaimana keadaan dari dana desa, karena adanya pemberitahuan atau informasi yang diberikan pemerintah desa yang dalam hal ini adalah bagian dari Anggota BPD Desa Buntu Karau yang menjadi portal pertama yang menerima dan mengetahui bagaimana keadaan dana desa tersebut. Seseorang yang berada dalam usia produktif cenderung memiliki kondisi fisik dan psikis yang optimal dalam bekerja. Mereka dapat melakukan kegiatan secara optimal dan mampu mengembangkan diri dengan baik. Begitu pula sebaliknya, seseorang yang berada dalam usia tidak produktif cenderung melakukan pekerjaan dengan tidak optimal.

Berdasarkan penggolongan usia menurut BPS, seseorang dapat dikatakan berada dalam usia produktif jika berusia antara 15-64 tahun, dan bagi seseorang yang berusia lebih dari 64 tahun artinya mereka termasuk kedalam kelompok usia tidak produktif. Pembangunan desa yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat akan sangat membutuhkan partisipasi dari masyarakat yang berada pada kelompok usia produktif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 20 responden. Usia masyarakat berada pada kisaran 20–60 tahun. Masyarakat maupun anggota BPD yang mengikuti musyawarah sebanyak 33 orang responden berada dalam kategori usia produktif, 2 orang dalam usia tidak produktif, dan sebanyak lima orang responden berada dalam kategori usia produktif. Baik antara masyarakat yang mengikuti musyawarah maupun anggota BPD sama-sama didominasi oleh masyarakat yang berada di dalam usia produktif, keduanya memiliki potensi yang besar untuk dapat terlibat secara aktif dalam mengelola dana desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota BPD Desa Buntu Karau dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 12 Agustus 2021 dikemukakan sebagai berikut. *“.....kami selalu mengikuti musyawarah dan selalu membantu dalam tahap pelaksanaan contohnya kalau ada gotong royong kami khususnya para pemuda ikut serta. Kami mengikuti musyawarah karena saran maupun masukan dari kami diperlukan perangkat Desa”*

Jika dilihat dari aspek partisipasi, anggota BPD yang mengikuti musyawarah yang berada dalam kelompok usia produktif memang memiliki tingkat partisipasi yang lebih tinggi daripada anggota masyarakat yang hadir. Hal tersebut dikarenakan anggota BPD yang mengikuti musyawarah memang terlibat langsung dalam setiap tahap partisipasi, berbeda dengan masyarakat yang tidak selalu mengikuti musyawarah yang hanya terlibat saat tahap pelaksanaan dan menikmati hasilnya. Walaupun demikian, keduanya sama-sama memberikan kontribusi saat dilaksanakan pembangunan, mereka ikut menyumbangkan bantuan tenaga untuk ikut gotong royong membangun drainase, jalan, dan pembangunan lain sesuai dengan pembangunan yang sedang dilaksanakan di wilayah masing-masing. Oleh karena kondisi fisik yang masih dapat bekerja secara optimal maka bantuan tenaga dari masyarakat tersebut dirasa sangat membantu saat melaksanakan pembangunan. Jika dibandingkan dengan masyarakat yang usianya sudah tidak produktif maka tenaga yang mereka keluarkan tidak akan sebanyak masyarakat yang berada dalam usia produktif sehingga hasil kerjanya pun tidak akan sebaik masyarakat yang berada dalam usia produktif. Pada hakikatnya, pendidikan berfungsi untuk mengembangkan kemampuan, meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia, baik individu maupun sosial. Sifat yang ditunjukkan oleh masyarakat cenderung dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan yang dimiliki. Tingkat pengetahuan dalam program, dipengaruhi oleh banyaknya informasi yang diperoleh baik dari pengelola program maupun dari tokoh masyarakat.

Berdasarkan hasil temuan dilapangan bahwa anggota BPD yang mengikuti musyawarah memiliki tiga jenjang pendidikan yaitu SMA, D3 dan S1. Sedangkan Jenjang

pendidikan yang paling tinggi yang dimiliki oleh masyarakat yang mengikuti musyawarah adalah jenjang pendidikan SMA. Berbeda dengan anggota BPD yang mengikuti musyawarah.

Perbedaan mayoritas tingkat pendidikan antara anggota BPD yang mengikuti musyawarah dengan masyarakat yang mengikuti musyawarah membuat kinerja keduanya dalam pengelolaan dana desa juga berbeda. Anggota BPD yang mengikuti musyawarah dan mayoritas memiliki jenjang pendidikan yang lebih tinggi memiliki kinerja yang lebih positif dalam pengelolaan dana desa. Masyarakat memiliki kesadaran bahwa mereka harus terlibat di dalam proses pengelolaan dana desa agar nantinya penggunaan dana desa dapat sesuai sasaran sehingga mereka tidak hanya sekedar mengikuti musyawarah saja namun mereka juga aktif memberikan masukan atau kritik dalam pengelolaan dana desa serta ikut melakukan pengawasan dalam pengelolaan dana desa. Hal tersebut dilakukan karena masyarakat mengetahui bahwa dana desa ini diperuntukkan untuk kepentingan masyarakat agar kesejahteraan mereka lebih meningkat sehingga mereka merasa memiliki kewajiban untuk mengawal proses pengelolaan dana desa, dengan demikian dapat dikatakan jika pengetahuan mereka tentang pengelolaan dana desa lebih tinggi maka peruntukan dana desa akan tepat sasaran.

Berbeda dengan masyarakat umum yang tidak mengikuti musyawarah desa, masyarakat yang tidak mengikuti musyawarah desa memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah. Hal tersebut turut mempengaruhi kinerja mereka dalam pengelolaan dana desa. Masyarakat umum cenderung tidak terlalu memperdulikan bagaimana dana desa dikelola. Mereka menganggap bahwa dirinya adalah orang kecil yang hanya lulusan SMP yang tidak tahu menahu mengenai masalah keuangan desa, dan merekapun merasa tidak perlu dilibatkan dalam urusan tersebut. Ada pihak-pihak yang lebih mengetahui tentang pengelolaan dana desa dibandingkan dengan mereka. Melihat kinerja masyarakat yang demikian itu, dapat dikatakan jika masyarakat tidak cukup memiliki pengetahuan untuk ikut serta dalam mengelola dana desa dikarenakan pengetahuan mereka mengenai pengelolaan dana desa lebih rendah jika dibandingkan dengan anggota BPD maupun perwakilan masyarakat yang memiliki tingkat pengetahuan lebih tinggi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota BPD Desa Buntu Karau yang mengikuti musyawarah dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 12 Agustus 2021 dikemukakan sebagai berikut. *".....walaupun saya cuma lulusan SMA tapi tahu pasti bagaimana BPD dengan efektif menggunakan dana desa sebaik mungkin....."* Dari pernyataan anggota BPD menunjukkan bahwa mereka merasa mempunyai kemampuan dalam pengelolaan dana Desa dan mempercayakan dan mengawasi sepenuhnya kepada perangkat Desa dalam pengelolaan dana Desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota BPD Desa Buntu Karau yang mengikuti musyawarah dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 16 Agustus 2021 dikemukakan sebagai berikut. *".....karena saya bekerja sebagai pegawai PDAM dan sebagai anggota BPD, saya merasa sangat prihatin dengan keadaan air yang dari dulu sampai sekarang tidak ada perubahan. Berhubung yang menjadi perangkat Desa adalah teman saya. Saya menawarkan untuk melakukan pengolahan air dengan secara sukarela. Sehingga akhirnya warga sekarang lagi mengupayakan pengolahan air bersih....."*

Hal ini menunjukkan BPD telah berkoordinasi dengan aparat Desa sudah peduli dengan keperluan warga dalam pengelolaan dana Desa yang digunakan untuk keperluan air bersih. Tingkat pendidikan biasanya menjadi tolak ukur tersendiri dalam melihat seberapa besar prioritas usulan pembangunan yang harus diambil. Biasanya masyarakat yang ikut berpartisipasi lebih tinggi adalah orang-orang yang berada pada lingkup pemerintahan kampung yang sebagian besar berpendidikan sedang dan tinggi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota BPD Desa Buntu Karau yang mengikuti musyawarah dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 16 Agustus 2021 dikemukakan sebagai berikut. *"...Biasanya kalau mengikuti rapat-rapat itu tidak melihat dia dari mana atau pun kerjanya apa, kalau mau ikut ya ikutlah, kalau tidak mau ikut siapa yang mau melarang, itu hak dia yang penting saat rapat bisa memberikan solusi bagi permasalahan yang dihadapi....."* Hasil wawancara dengan anggota BPD Desa Buntu Karau yang mengikuti musyawarah yang dilakukan pada tanggal 16 Agustus 2021 dikemukakan sebagai berikut. *"....yang ikut-ikutan itu banyak juga yang tak bisa hadir karena berhalangan, rapat rapat disini biasanya itu pagi, jam-jam kantor yang sudah pasti punya*

pekerjaan sendiri, tentu tidak bisa ikut, seperti petani, buruh harian dan PNS, makanya yang bisa ikut-ikut itu orang-orang yang bekerja di sekitar sini ajalah”

Hal ini karena anggota BPD mayoritas masyarakat bekerja sebagai petani, PNS, wiraswasta, dan berkebun. Namun, dilihat dari aspek partisipasi, masyarakat yang tidak mengikuti musyawarah karena pekerjaan juga memberikan kontribusi saat dilaksanakan pembangunan, mereka ikut menyumbangkan tenaga untuk ikut gotong royong apabila pengerjaan didekat tempat tinggal mereka.

Mata pencaharian ini juga menjadi tolak ukur juga dalam kinerja anggota BPD. Sebagian besar Masyarakat berpenghasilan rendah mereka tidak peduli dalam pengelolaan dana Desa. Dikarenakan mereka sibuk mencari nafkah siang dan malam. Berbeda dengan mereka berpenghasilan sedang ke atas yang cenderung hadir dalam pengelolaan dana Desa dan memberikan masukan kepada aparat Desa yang ada.

PENUTUP

Dengan melihat latar belakang masalah serta analisa yang dikemukakan maka dapat diperoleh simpulan dan saran-saran sebagai berikut :

Kesimpulan

1. Partisipasi dan kinerja BPD Desa Buntu Karau dalam Perencanaan Pembangunan Desa dengan cara melaksanakan hasil musyawarah sehingga memiliki kinerja yang positif dalam pengelolaan dana desa karena BPD selalu mendapatkan dukungan dari tokoh masyarakat untuk aktif mengelola dana desa yaitu berupa dukungan penghargaan, dukungan informatif, dan dukungan instrumental. Tingkat kinerja yang dimiliki oleh Anggota BPD mengikuti musyawarah untuk pengelolaan dana desa tergolong tinggi. Tingginya tingkat partisipasi karena sebagian besar anggota hadir dalam setiap tahap pengelolaan dana desa mulai dari tahap perencanaan hingga tahap evaluasi.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja BPD dalam pembangunan desa melalui penggunaan dana desa, dari faktor internal yaitu umur, tingkat pendidikan, dan tingkat pendapatan dengan tingkat kinerja anggota BPD dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi memiliki pengetahuan serta kesadaran untuk terlibat dalam mengelola dana desa. Usia yang produktif pun membuat lebih aktif dan bekerja lebih baik dalam mengelola dana desa.

Saran-Saran

Dengan adanya faktor penghambat tentunya tidak semua masalah dapat diselesaikan secara maksimal, karenanya disarankan kepada pihak berkompeten :

1. Bagi akademisi, penelitian ini memperlihatkan bahwa fenomena sosial kinerja BPD dalam pembangunan desa melalui penggunaan dana desa yang terjadi di desa Buntu Karau sangat memerlukan dukungan tokoh masyarakat dan partisipasi masyarakat desa sehingga Pengaruh faktor internal dan eksternal yang ada pada masyarakat perlu diperhatikan kembali agar mengetahui penyebab masyarakat mau untuk berpartisipasi.
2. Bagi masyarakat, menghilangkan kinerja apatis dalam pembangunan merupakan langkah yang tepat agar terciptanya BPD dalam proses pembangunan. Perasaan cukup menerima hasil saja tidak akan merubah pembangunan yang telah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya. Masyarakat harus berani untuk menyuarakan aspirasinya, sehingga perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan dapat ditentukan skala prioritasnya.
3. Bagi pemerintah desa, berdasarkan temuan di lapangan, partisipasi yang terjadi belum melibatkan masyarakat secara keseluruhan, namun BPD sudah berjalan dengan baik dalam mengelola anggaran dana desa terbukti dengan pembangunan sarana desa yang dapat mempermudah masyarakat dalam memenuhi sarana air bersin, jalan, ibadah maupun kegiatan kepemudaan.

REFERENSI

- Darmawi, 2014. BPD dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan di Desa Talang Leak I Kecamatan Bingin Kuning kabupaten Lebong. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPMP) di Desa Talang Leak I Kecamatan Bingin Kuning*.pdf.
- Deviyanti. 2013. Studi Tentang BPD Dalam Pembangunan Di Kelurahan Karang Jati Kecamatan Balikpapan Tengah. *eJournal Administrasi Negara Universitas Mulawarman*. Samarinda.
- Irawan. 2014. Indeks Kemandirian Desa : Metode, Hasil, dan Alokasi Pembangunan. Editor: Ivanovich Agusta dan Fujiartanto. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Isnaini dan Siregar SM. 2015. Implementasi kebijakan pemerintah Kabupaten labuhanbatu dalam pemberian alokasi dana desa (ADD) tahun 2014 di Desa Sei Tampang Kecamatan Bilah Hilir. *Jurnal Administrasi Publik* [internet]. [diunduh pada: 2021 Agustus 14]; 6(2):154-173. Tersedia pada: <http://ojs.uma.ac.id/index.php/adminpublik/article/view/73>
- Kusrini N, Amanah S, Fatchiya A. 2013. Kinerja masyarakat dalam program pengembangan Desa Pesisir Tangguh di Teluknaga, Tangerang, Banten.
- Sosio Konsepsia [Internet]. [diunduh 2021 Agustus 15]; 3(1):287-300.Tersedia pada: <http://ejournal.kemsos.go.id/index.php/SosioKonsepsia/article/view/782/380>
- Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pemerintah Republik Indonesia. Jakarta.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016. Pemerintah Republik Indonesia. Jakarta.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016. Pemerintah Republik Indonesia. Jakarta.
- Purwaningsih, Ernawati. (2008). BPD dalam pembangunan desa. *Jurnal Jantra*, 3(6), 443-452.
- Putra CK, Pratiwi R, Suwondo. 2013. Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pemberdayaan BPD. *Jurnal Administrasi Publik*. Vol. 1, No. 6. Hlm. 3
- Sarwono, SW dan Meinarno, EA. 2012. Psikologi Sosial. Jakarta : Salemba Humanika.
- Sihite R. 2007. Perempuan, Kesetaraan, dan Keadilan : Suatu Tinjauan Berwawasan Gender. Jakarta [ID] : PT RajaGrafindo Persada Sumodiningrat, Gunawan. 1999. Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengaman Sosial. PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Tumbel TN. 2014. Analisis bantuan desa dalam pembangunan desa. *Jurnal LPPM Bidang EkoSusBudKum* [Internet]. [Diunduh 2016 Oktober 17]; 1(2): 1-12. Tersedia pada: <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lppmekosusbudkum/article/download/7216/670>